

STRUKTUR DAN KINERJA INDUSTRI INDONESIA SETELAH 50 TAHUN MERDEKA:

Adakah peluang kecil ?

*Oleh: Mudrajat Kuncoro **

Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru telah membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat menem-
patkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik sebagai panglima telah diganti dengan ekonomi sebagai panglima, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Dalam konstelasi politik yang baru ini, militer telah menempati posisi yang paling atas dalam herarki kekuasaan. Sejarah mencatat, pemerintah Orba telah berhasil dalam melenyapkan hyperinflasi (inflasi beratus- ratus persen), mengubah modal yang henggang ke luar negeri menjadi arus masuk swasta yang substansial, mengubah defisit cadangan devisa menjadi selalu positif, mempertahankan harga beras dan meningkatkan produksi beras hingga mencapai tingkat swasembada, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menentukan jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan.

Dibalik prestasi yang banyak mendapat pujian tersebut, harus diakui masih banyak "catatan pinggir" yang masih layak untuk ditelaah lebih mendalam. Salah satunya adalah masalah dualisme yang masih dirasakan di berbagai sektor perekonomian. Makalah ini akan menelusur dualisme industri Indonesia. Dualisme ini muncul karena orientasi industrialisasi yang ber-

basis modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat. Padahal, pengalaman Taiwan, misalnya, justru menunjukkan bahwa ekonominya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah, yang sering disebut *community based industry*. Oleh karena itu, makalah ini akan menelaah bagaimana struktur serta kinerja industri Indonesia setelah 50 tahun merdeka. Analisis terutama difokuskan pada periode setelah tahun 1965 mengingat berbagai data industri sebelum periode tersebut amat sulit dipercaya keakuratannya karena hiperinflasi maupun kekacauan politik. Pertanyaan mendasar yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah: Apakah peluang bagi usaha kecil dalam era globalisasi? Upaya apakah yang harus ditempuh agar dapat mengembangkan struktur industri yang mampu menggerakkan dinamika kerakyatan dengan basis usaha kecil dan koperasi?

DUALISME INDUSTRI INDONESIA

Tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi di Indonesia sejak Pelita I hingga saat ini telah mencapai hasil yang diharapkan. Setidaknya industrialisasi telah mengakibatkan transformasi struktural di Indonesia. Pola pertumbuhan ekonomi secara sektoral di Indonesia agaknya sejalan dengan ke-

*. Staf pengajar dan peneliti pada Fakultas Ekonomi UGM. Saat ini mendapatkan kepercayaan sebagai Kepala Divisi Industri dan Energi PAU Studi Ekonomi dan Pengelolaan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM.

Tabel 1. Distribusi Produk Domestik Bruto dan Laju
Pertumbuhan sektor (%).

Sektor	Pangsa Dalam PDB		Rata-rata Pertumbuhan per Tahun	
	1965	1992	1965-80	1980-1992
Perindustrian	56,0	19,0	4,3	3,1
Industri	13,0	40,0	11,9	6,1
(Industri manufaktur)	8,0	21,0	12,0	12,0
Jasa, dll	31,0	40,4	7,3	6,8

Sumber: World Bank (1991, 1994)

cenderung proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian (sering disebut sektor primer), sementara kontribusi sektor sekunder dan tersier cenderung meningkat.

Kecenderungan ini pada tabel 1. Pada tahun 1965, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (56 persen); sementara sektor industri baru menyumbang 13 persen dari PDB. Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,9 persen selama 1980-1992, sektor industri telah menggeser peranan sektor pertanian dalam pembangunan. Pada tahun 1992, sektor industri secara ke-

seluruhan menyumbang 40 persen terhadap PDB. Pada tahun yang sama, sumbangan sektor pertanian merosot drastis hingga tinggal 19 persen dari PDB. Ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan sektor pertanian, dari rata-rata 4,3 persen per tahun selama 1965-1980 menjadi 3,1 persen selama 1980-1992. Singkatnya, sektor industri manufaktur muncul menjadi penyumbang nilai tambah dominan dan telah tumbuh pesat melampaui laju pertumbuhan sektor pertanian. Para ahli sejarah perekonomian tanpa ragu akan menilai bahwa pertumbuhan dan transformasi industri selama 25 tahun terakhir merupakan

Tabel 2. Kontribusi Usaha Kecil dalam Industri Manufaktur.

	Unit Usaha		Tenaga Kerja		Nilai Tambah	
	Jumlah	%	Orang	%	Juta (Rp.)	%
1. Industri Menengah dan besar	12.765	0,8	1.691.435	32,7	9.348.483	82,2
2. Industri Kecil	94.534	6,2	770.144	14,9	775.304	6,8
3. Industri rumah Tangga	1.416.935	93,0	2.714.264	52,4	1.254.419	11,0
Total	1.524.234	100,0	5.175.843	100,0	11.378.206	100,0

Sumber: BPS (1991).

Tabel 3. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 1971-1988 (persen).

Sektor	1971	1980	1985	1990	1994
1. Pertanian	67,04	56,30	54,72	50,43	46,22
2. Pertambangan dan Pengalihan	0,21	0,76	0,67	1,01	0,90
3. Industri Pengolahan	6,92	9,14	9,29	11,53	13,24
4. Listrik, air dan gas	0,09	0,13	0,11	0,20	0,22
5. Bangunan	1,72	3,23	3,36	4,13	4,34
6. Perdagangan	10,96	13,04	14,98	14,87	17,05
7. Transportasi dan komunikasi	2,42	2,87	3,14	3,69	4,12
8. Perbankan, Keuangan Jasa.	0,23	0,59	0,04	0,96	0,76
9. Pelayanan umum dan jasa lain.	13,95	13,95	13,33	13,18	13,13
JUMLAH	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
TOTAL KESEMPATAN KERJA	39.210	51.533	62.456	70.891	81.903

Sumber: BPS, berbagai tahun.

salah satu prestasi Orde Baru yang layak dicatat.

Hanya saja strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi modal, proteksi, dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi dan dualisme dalam proses pembangunan. Fakta menunjukkan sektor manufaktur yang modern hidup berdampingan dengan sektor pertanian tradisional dan kurang produktif. Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang berdampingan dengan industri menengah dan besar.

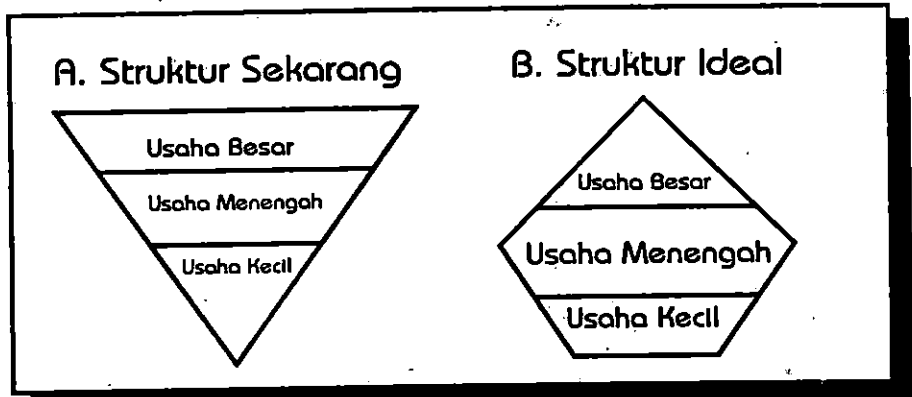
Tabel 2 menunjukkan bahwa industri kecil dan rumah tangga (IKRT) memiliki peranan yang cukup besar dalam industri manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai tambah. Dari total unit usaha manufaktur di Indonesia sebanyak 1,524 juta, ternyata 99,2 persen merupakan unit usaha IKRT. IKRT, dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, mampu menyediakan, sumbangan nilai tambah IKRT terhadap industri manufaktur hanya sebesar 17,8 persen.

Sementara itu, transformasi ekonomi agaknya tidak se-lalu sejalan dengan trans-

formasi sosial sebagaimana ter-cermin dalam perubahan lapangan kerja penduduk. Tabel 3 menunjukkan ternyata persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian terhadap total penduduk yang bekerja tidak anjlok sedrastis penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB. Pada tahun 1971, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 67,04 persen. Pada tahun 1994,, meskipun menurun, ternyata penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih sebesar 46,22 persen. Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perekonomian Indonesia pada dasarnya masih bersifat agraris, karena sebagian besar penduduk masih meng-gantung diri pada sektor pertanian.

STRUKTUR DAN KINERJA INDUSTRI

Di Indonesia, struktur industri masih belum dalam (shallow) dan belum seimbang (unbalance). Berbagai studi dengan memanfaatkan tabel input-output menunjukkan bahwa kaitan ekonomis antara industri berskala besar, menengah dan kecil masih amat minim, kecuali untuk subsektor makanan, produk kayu dan kulit. Hal ini



semakin diperarah dengan struktur industri yang masih kuasi-monopolistik dan oligopolistik. Struktur industri dapat dilihat dari rasio konsentrasinya sebagai berikut (lihat tabel 4). Pertama, rata-rata tingkat konsentrasi untuk sektor manufaktur sebesar 47 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi industri di negara maju (Inggris 22 persen dan AS 36 persen). Kedua, berdasarkan standar internasional, suatu industri dikatakan berstruktur oligopoli bila empat perusahaan terbesar dalam industri yang sama mempunyai konsentrasi di atas 40 persen. Karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan struktur pasar industri manufaktur Indonesia berciri oligopolis.

Menurut survei yang dilakukan oleh Econit (1995), penyebab terjadinya oligopoli di Indonesia karena 4 hal, yaitu : (1) proteksi (tata niaga), (2) besarnya modal yang diperlukan untuk investasi, (3) tingginya teknologi yang digunakan, (4) preferensi terhadap produk. tabel 5 secara rinci menggambarkan beberapa sektor industri ologopolis.

Struktur semacam ini menyebabkan tiadanya tekanan persaingan untuk melakukan minimisasi biaya. yang terkahir

ini semakin sulit diatasi karena masih mendapat proteksi tarif dan non tarif yang tinggi dari pemerintah. Akibatnya, harga domestik dari produk seperti tepung terigu, minyak goreng, semen, bahan plastik, dan mobil jauh lebih tinggi dibanding harga internasional.

Lebih menarik lagi apabila fakta konsentrasi industri dikaitkan dengan kinerja industri dalam bidang ekspor. Orientasi ekspor diharapkan dapat digunakan sebagai indikator efisiensi (mengingat data efisiensi yang akurat secara sektoral tidak tersedia), karena eksportir mau tidak mau harus bersaing dengan efisien di pasar global. Studi empiris yang dilakukan Iqbal (1995) menunjukkan adanya korelasi negatif antara orientasi ekspor dengan konsentrasi industri. Subsektor yang konsentrasinya tinggi cenderung tidak mau banyak terlibat dalam aktivitas ekspor. Hal ini kemungkinan besar karena subsektor yang berkonsentrasi tinggi tidak dapat bersaing di pasar terbuka yang tidak diproteksi. Tabel 6 menyajikan rangkuman studi Iqbal (1995) yang melakukan analisis berdasarkan observasi 118 subsektor industri bukan logam, barang berorientasi ekspor tinggi sekaligus tingkat konsentrasinya rendah, meliputi industri

Tabel 4. Rasio Kosentrasi dalam Sektor Manufaktur.
(Pangsa 4 perusahaan terbesar, dalam persentase).

	Klasifikasi	1985	1991
31	Makanan, minuman, tembakau	59,1	61,5
32	Tekstil, pakaian jadi, kulit	24,9	24,0
33	Produk Kayu	13,4	15,9
34	Kertas	43,8	50,2
35	Kimia	46,4	44,6
36	Barang galian bukan logam	75,7	58,1
37	logam Dasar	82,0	71,8
38	barang dari logam, mesin dan peralatannya	49,7	57,4
39	pengolahan lain	71,9	49,0
Rata-rata tertimbang		49,5	47,1

Sumber: Diolah dari data BPS Oleh Mudrajad Kuncoro dan Anggito Abimanyu (1995).

Tabel 5. Penyebab Terjadinya Oligopoli di Indonesia.

Sektor Industri	Penyebab terjadinya Oligopoli			
	Proteksi (Tata niaga)	Modal Besar	Teknologi Tinggi	Preferensi Produk
Minyak Goreng	*	-	-	-
tepung Terigu	*	-	-	-
Tembakau	-	-	-	*
Produk kaca	-	*	*	-
Semen	*	*	-	-
Industri non besi	-	*	*	-
Peralatan profesional	-	-	*	-

Sumber: Econit sebagaimana dikutip oleh KOMPAS, 6 Juni 1995, hal 13.

Tabel 6. Konsentrasi dan Orientasi Ekspor.

	Orientasi Ekspor Tinggi	Orientasi Ekspor Rendah
		Bukan Logam Barang dari Logam Kimia Kertas Makanan Logam Dasar
Konsentrasi Tinggi		
Konsentrasi rendah	Barang dari Kayu Tekstil/sepatu	

Catatan: Konsentrasi tinggi bila konsentrasi subsektor (rasio 4 perusahaan terbesar pada tahun 1991) lebih tinggi dibanding rata-rata tertimbang industri sebesar 47 persen; orientasi ekspor tinggi bila pangsa total produksi yang diekspor lebih tinggi dibanding rata-rata industri sebesar 25 persen (pada tahun 1992).

Sumber : Iqbal (1995).

barang dari kayu dan industri tekstil/sepatu. Bukti-bukti empiris ini menunjukkan bahwa deregulasi telah menurunkan konsentrasi industri secara umum, melalui kenaikan pangsa subsektor yang berorientasi ekspor.

Kinerja ekspor dapat pula dilihat dari derajat ketergantungan ekspor. Derajat ketergantungan ekspor menunjukkan proporsi produksi suatu subsektor yang secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan keterkaitan suatu subsektor dengan aktivitas ekspor. Semakin tinggi derajat ketergantungan ekspor suatu subsektor berarti semakin ketergantungan ekspor terhadap subsektor tersebut. Penelitian Kuncoro dan Pradipto (1995), yang mengolah tabel Input-Output 1980-1985-1990, menunjukkan bahwa peringkat top ten dalam derajat ketergantungan ekspor didominasi oleh subsektor agroindustri yang mencakup produk pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri penyedia input pertanian. Sedangkan industri semen, rokok, tepung, mineral bukan logam, mesin. Besi baja mempunyai angka ketergantungan ekspor yang rendah. Subsektor agroindustri yang masuk dalam kelompok ini adalah unggas, ternak, padi kacang, jagung, cengkeh, tebu, pemotongan hewan, serat, dan industri penggilingan padi. Rendahnya derajat ketergantungan ekspor membuktikan bahwa subsektor-subsektor tersebut lebih berorientasi pada pasar dalam negeri dibanding melayani pasar ekspor.

MENGAPA USAHA KECIL PERLU DIKEMBANGKAN?

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan in-

vestasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomerat yang mendapat keuntungan (Abimayu, 1994). Setidaknya ini terlihat dari tabel 7 yang menunjukkan pola pertumbuhan (graduation) perusahaan dilihat dari jumlah perusahaan kecil relatif rendah (9,31%), dibanding perusahaan menengah (12,3%) dan perusahaan kecil yang graduate lebih tinggi dibanding yang lain. Masalahnya ternyata pertambahan nilai tambah tidak dinikmati oleh perusahaan baik berskala kecil, sedang dan besar. Justru perusahaan milik konglomerat yang berskala amat besar (dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang) yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan.

Dalam konstelasi inilah, perhatian untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKRT) setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, IKKRT menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, IKKRT memegang peranan penting dalam ekspor non migas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati ranking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. Ketiga, adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida pada PJPT I menjadi semacam "gunungan" pada PJPT II. Struktur ekonomi bentuk piramida terbukti telah menemukan isu konsentrasi dan konglomerasi, serta banyak dituding melestarikan dualisme perekonomian nasional. Bentuk "ideal" yang banyak disarankan adalah "gunungan", dimana: pada bagian atas adalah kelompok usaha besar yang memang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia tetapi proporsinya relatif kecil dari pada kelompok usaha mencegah; di bagian tengah menunjukkan kelompok atau usaha menengah yang merupakan proporsi terbesar dari struktur ekonomi nasional; sedangkan bagian bawah hanyalah sebagian kecil saja dari keseluruhan ekonomi nasional.

Tabel 7. Graduation dan Degredasi Perusahaan Manufaktur Indonesia, 1980-1985, 1986-1992.

1985	Jumlah Perusahaan					exit	1980	1985
	Small	Medium 1	Medium 2	Large	Very Large			
1980								
Small	4100	702	137	6	1	2380	7326	4525
Medium 1	367	803	403	20	1	321	1904	1663
Medium 2	53	156	1202	138	24	197	1770	1833
Large	3	2	77	170	65	9	326	359
Very Large	2	0	14	36	124	8	184	215

1992	Jumlah Perusahaan					exit	1992	1986
	Small	Medium 1	Medium 2	Large	Very Large			
1986								
Small	5241	887	271	15	10	3753	10.177	5684
Medium 1	390	918	641	24	6	587	2566	1962
Medium 2	51	147	1621	254	96	451	2620	2592
Large	1	7	48	205	140	61	462	530
Very Large	1	3	11	32	206	32	485	458

	NILAI TAMBAH			Per Perusahaan (Milyar Rupiah)		
	Total (Milyar Rupiah)			1985	1992	85-92
Kecil	557	103	-454	0,11	0,02	-0,09
Menengah	2410	1011	-1399	2,12	0,76	-1,35
Besar	1705	1117	-588	6,61	3,84	-2,77
Konglomerat	3235	5676	2442	22,78	25,23	2,45

Catatan: Perusahaan Kecil (small): Jumlah tenaga kerja 20-49 orang, perusahaan menengah 1 (medium 1): jumlah tenaga kerja 50-99; Perusahaan Menengah 2 (medium 2): Jumlah tenaga kerja 100-499; Perusahaan besar (large): Jumlah Tenaga kerja 500-1000; Perusahaan sangat besar (verylarge): jumlah tenaga kerja 1000 keatas.

Sumber : Data mentah Perusahaan Mnaufaktur, BPS dan Bank Dunia.

Langkah strategis agar membuat struktur ekonomi di mana lapisan menengah semakin banyak adalah mendorong pertumbuhan usaha kecil yang tangguh dan, syukur, dapat graduate menjadi usaha menengah yang mandiri.

pertanyaan yang barangkali muncul, kemudian, adalah: bagaimana profil industri/pengusaha kecil di Indonesia? Adakah bagi usaha kecil dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan.

PROFIL USAHA KECIL

Dalam setiap diskusi mengenai usaha kecil selalu timbul ketidaksamaan persepsi tentang siapa yang dimaksud dengan perusahaan/industri kecil. Biro Pusat Statistik memberikan klasifikasi industri berdasarkan skala penggunaan tenaga kerjanya, yaitu: (1) industri besar bila menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 orang; (2) industri sedang bila menggunakan tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang; (3) industri kecil bila menggunakan tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang; (4) industri rumah tangga bila menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Departemen Perdagangan lebih menitikberatkan pada aspek permodalan, bahwa suatu usaha disebut usaha kecil apabila permodalannya kurang dari Rp 25 juta. Departemen Perindustrian mendefinisikan industri kecil sebagai industri yang mempunyai aset tidak lebih dari Rp 600 Juta. KADIN mendefinisikan industri kecil sebagai aktor usaha yang memiliki aset maksimal Rp 250 juta, tenaga kerja paling banyak 300 orang dan nilai penjualan di bawah Rp 100 Juta. departemen Koperasi dan PPK agaknya sependapat dengan Bank Indonesia, yang menggolongkan pengusaha kecil (PK) berdasarkan kriteria omset Usaha tidak lebih dari 2 milyar dan kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari Rp 600 juta.

Perbedaan persepsi mengenai pengusaha/industri kecil ini pada gilirannya menyebabkan pembinaan PK masih terkotak-kotak atau sector oriented, di mana masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua hal: (1) ketidak efektifan arah pembinaan; (2) tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri. Karena egoisme sektoral/departemen, dalam praktek sering dijumpai terjadinya "persaingan" antar organisasi pembina. Bagi pengusaha kecil pun, mereka sering mengeluh karena hanya selalu dijadikan "obyek" binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah mereka secara langsung.

Kendata banyak definisi mengenai PK, namun agaknya PK mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya, data BPS menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.

Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Menurut catatan BPS (1993), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan

perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, FIRMA, atau Koperasi).

Secara garis besar, kita dapat membagi tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dalam dua kategori: pertama, bagi PK dengan omset kurang dari 50 juta umumnya tantangan yang dihadapinya adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjalan dengan aman sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP, (Tempat Pelayanan simpan Pinjam-KUD) amat membantu modal kerja mereka.

Kedua, bagi PK dengan omset antara RP 50 juta hingga 2 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan studi Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh PK jenis adalah: Pertama, masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Kedua, masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk pinjaman baik dari Bank maupun modal ventura. Ketiga, masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor.

ADAKAH PELUANG BAGI USAHA KECIL?

Melihat konstelansi usaha kecil di Indonesia, masalahnya sekarang adalah: Adakah peluang bagi usaha kecil dan bagaimana strategi mereka dalam era globalisasi dan perdagangan bebas?

Setidaknya ada 2 macam strategi dasar yang relevan bagi usaha kecil. Pertama, karena kata kunci dalam era globalisasi adalah persaingan, maka usaha kecil dan koperasi perlu memusatkan diri pada keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Michael Porter (1980; 1985) mengajarkan bahwa perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif dalam suatu industri dengan memilih satu diantara tiga generic strategies, yaitu: (1) kepemimpinan ongkos: menghasilkan dan mendistribusikan produk dengan biaya rendah relatif dibanding para pesaingnya; (2) deferensiasi: upaya penciptaan sesuatu yang baru yang dirasakan unik oleh keseluruhan industri; (3) fokus: perusahaan dapat melayani pasar yang jelas terdefinisi namun sepi secara lebih baik dibanding pesaing yang melayani pasar yang lebih luas. Analisis Porter (1991) mengenai keunggulan kompetitif lebih menekankan pada kemampuan usaha kecil untuk meraih sukses dengan secara cermat mendefinisikan pangsa dan segmen (niches) pasar mereka.

Porter mengidentifikasi dua strategi fokus yaitu: (a) strategi fokus berdasarkan biaya rendah, yang tergantung pada adanya target segmen yang menginginkan biaya rendah; (b) strategi fokus berdasarkan diferensiasi, yang tergantung pada adanya target segmen yang menginginkan atribut keunikan produk. dengan Diamond model-nya, keunggulan kompetitif berasal dari perusahaan yang dapat mengembangkan suatu strategi yang jitu yang didesain untuk memfokuskan segenap kekuatannya pada suatu segmen pasar tertentu. Pada tingkat internasional atau global, dimensi strategi kompetitif tersebut mencakup ruang lingkup multidomestik ataukah global. Tabel 8 merangkup perbedaan dua spektrum dasar ini. Kunci sukses bagi usaha kecil, menurut Howard (1990), adalah melakukan adaptasi secara cepat terhadap tekanan persaingan. Kendati demikian, asumsi implisit dari model pengembangan usaha kecil tersebut adalah iklim yang kondusif bagi interaksi dan

Tabel 8. Ciri Persaingan dan Strategi Industri

Ciri	Industri Multidomestik	Industri Global
1. Persaingan	* Persaingan di tiap negara pada dasarnya tidak berkaitan dengan persaingan di negara lain. * Industri Internasional menjadi kumpulam yang menarik	* Suatu industri di mana posisi kompetitif suatu perusahaan di suatu negara sangat dipengaruhi posisinya di negara lain, vice versa. * Industri tidak hanya suatu kumpulan industri tapi juga industri yang berkaitan dimana pesaing saling bersaing pada skala dunia.
2. Strategi	* Perusahaan harus mengelola aktivitas internasionalnya sebagai suatu portofolio. * Strategi nasional harus menikmati otonomi yang tinggi. * Strategi perusahaan di suatu negara amat ditentukan oleh kondisi persaingan di negara tsb (country centered strategy) * Strategi internasional jatuh ke dalam seperangkat strategi domestik.	* Perusahaan harus mengintegrasikan aktivitasnya di tingkat dunia untuk menangkap keterkaitan antar negara. * Pesaing global harus memandang aktivitas internasionalnya sebagai suatu sistem yang menyeluruh namun masih tetap menjaga beberapa perspektif negara.

Sumber : Peter Dicken (1992, h.143); Porter (1986).

keterkaitan antara usaha kecil dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan perguruan tinggi.

Kedua, apabila peluang untuk bersaing tidak memungkinkan, alternatif yang dapat dipilih adalah melakukan aliansi bisnis. Ide dasar aliansi adalah dari pada bersaing saling mematikan lebih baik bekerja sama saling menguntungkan. Secara umum aliansi strategik dalam skala global dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: Pertama, aliansi patungan (*alliance joint venture*), dengan ciri partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Kedua, aliansi khusus-fungsional (*functional-specific alliances*), dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau fungsi-fungsi khusus tertentu. Perbedaan dua kategori aliansi ini dapat dilihat pada tabel 9. Baik aliansi strategik yang pertama maupun kedua sebaiknya dilakukan atas pertimbangan yang bisnis-rasional dan tidak berdasarkan anjuran pejabat X saja. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa program kemitraan yang didasarkan atas petunjuk Bapak X cenderung tidak mendidik dan hanya bersifat musiman.

PENUTUP

Hanya saja para pemikir yang kritis mulai mempertanyakan: ke mana arah sistem ekonomi kita nantinya? GBHN memang sudah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut *free-fight* *leberalism* maupun *etatisme*. Sistem Ekonomi Pancasila versi Mubarto dan Emil Salim, serta isu demokrasi ekonomi yang sempat ramai beberapa waktu lalu, nampaknya baru pada taraf "normatif" dan belum mampu menjawab dinamika perekonomian Indonesia yang dinilai banyak pihak semakin terbuka dan "ke kanan".

Kalaupun ada yang mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil barangkali hanya akan dianggap sebagai upaya membuat agar perekonomian Indo-

nesia berwajah lebih "merakyat". Tanpa bermaksud mengecilkan arti dan 'kemajuan' koperasi pada saat ini, nampaknya 'beban berat' koperasi mengemban amanat sebagai sokoguru ekonomi perlu ditinjau kembali. Menjadikan koperasi sebagai sokoguru memang sebuah ide mulia, sekaligus menjadi masalah besar. Krena yang terakhir ini selalu diartikan perlunya campur tangan pemerintah dalam pengembangan koperasi, hingga munculah gerakan koperatisasi: koperasi sarat dengan pesan-pesan konstitusional dan misi departemental. Koperasi dalam konteks ekonomi Indonesia modern haruslah koperasi yang modern pula; ia harus sedinamis perekonomian itu sendiri. Karena persaingan adalah kata kunci dalam ekonomi global, mau tidak mau, ide koperasi sebagai organisasi ekonomi berwatak bisnis (tidak lagi berwatak sosial) sungguh layak untuk dipertimbangkan. Barangkali sudah saatnya dilakukan semacam *business reengineering* bagi koperasi.

Oleh karena itu, apabila kita ingin berbiaya banyak dalam pasar global, mau tidak mau distorsi semacam itu harus dihilangkan. Sudah saatnya proteksi bagi industri yang tidak efisien dan "jago kandang" dihilangkan, setidaknya dikurangi porsinya. Momentum liberalisasi perdagangan dunia dan disepakatinya WTO agaknya merupakan external pressure untuk meniadakan berbagai proteksi yang menimbulkan ekonomi-biaya tinggi. Ini perlu dibarengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur dan superstruktur dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar global. Pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategik yang perlu ditindak lanjuti dengan langkah nyata dan tidak hanya berhenti pada retorika politik semata. Agar dapat bersaing di pasar global, sudah saatnya iklim persaingan di dalam negeri dibenahi. Dengan langkah semacam itu, Insya Allah, kita tidak hanya menjadi "penggembira" dalam persaingan global.

Tabel 9. Dua jenis aliansi strategi internasional.

Alliance joint ventures	Functional specific competitive alliance
• Badan hukum terpisah dengan, atau kadang-kadang tanpa, kontribusi ekuitas. • Kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas • Adalah umum bagi partner yang bekerjasama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu, sementara pada saat yang sama tetap beroperasi sebagai pesaing di pasar yang lain.	• Badan hukum tidak terpisah • Kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu , misalnya : (a) dalam litbang (kerjasama dalam riset produk baru dan teknologi); (b) persetujuan lisensi silang (perluasan produk dengan memasarkan produk perusahaan lain dalam suatu pasar tertentu); (c) persetujuan lisensi silang (hampir sama dengan distribusi silang ,hanya ditambah kemungkinan menciptakan standar global untuk teknologi tertentu); (d) persetujuan kerjasama manufaktur (untuk mencapai skala ekonomis dan mengatasi kekurangan/ kelebihan kapasitas produksi); (e) joint bidding consortia (sangat penting dalam proyek mega).

Sumber : Business Internasional (1987) dalam Mudrajad Kuncoro (1994).

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito (1994), "Orientasi Usaha dan kinerja Bisnis Konglomerat", makalah dalam Seminar Nasional "Mencari Keseimbangan Antara Konglomerat dan Pengusaha kecil-menengah di Indonesia: Permasalahan dan Strategi", Dies Natalis STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, 30 April.
- Booth, Anne, ed. (1992), *The Oil Boom and after: Indonesian Economic Policy dan Performance in the Soeharto Era*, Oxford: Oxford University Press.
- Budiman, Arief (1989), *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi ilmu sosial di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Ducken, peter (1992), *Global Shift: The Internationalization of Economic Activity*, edisi ke-2, Paul Chapman Publising Ltd, London.
- Hill, hal (1990), "Indonesia's Industrial Transformation: Part II", *Bulletin of Indonesian Economic Syudies*, No. 3, Vol.26, Desember.
- (1992), "Manufacturing Industry", dalam Anne Booth (ed.), *The Oil Boom and After: Indonesian Economin Policy and Performance in the Soeharto Era*, Oxford University Press, Singapore.
- Howard, R. (1990), *Can Small Business Help Countries Compete*, *Havard Business Review*, November-December.
- Kuncoro, Mudrajad (1994), "Struktural Adjustment in Indonesia: A survey of Recent Development", *Kelola (Gadjah Mada University Business Review)*, no.5/III/Januari.
- (1994), "Peta Bisnis Aliansi Strategik", *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, November.
- (1993), "Indonesia Menjelang Tahun 2000: sebuah renungan", *Analisis CSIS*, tahun XXII, no.2, maret-April.
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggito Abimayu (1995), "Struktur dan Kinerja Indutri Indonesia: Adakah Peluang Bagi Usaha Kecil?", *kelola Gadjah Mada University Business Review*, akan segera terbit.
- Kuncoro, Mudrajad dan Rimawan Pradiptyo (1995), *Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Agroindustri Indonesia*, laporan Penelitian, program Magister Manajemen UGM, Yogyakarta.
- Kustituantio, Bambang, Maskur Wiratmo, Mudrajad Kuncoro, dan R. Agus Sartono (1995), *Laporan Akhir Pengembangan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, kerjasama Depkop & PPK dengan PPE-FE-UGM, Yogyakarta.
- Mubyarto (1990), *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, LP3ES, Jakarta.
- Porter, Michael E. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, The Macmillan Press Ltd, London and Basingtoke.
- (1987), "from Competiitve Advantage to Corperate Strategies", *Harvard Business Review*, May-june, pp.43-59.
- (1980), *Competitive Strategy: Techniquaes for Analizing and Copetitors*, The Free Press, New York.
- Rahrdjo, M. Dawam (1995), "Aplikasi dan kritik Perkembangan Koperasi Dewasa ini:", makalah dalam seminar Nasional Apresiasi dan kritik Perkembangan Koperasi Indonesia, Depkop & PPK, Jakarta, 6 Juli.
- Sumodiningrat, Gunawan (1994), "tantangan dan Peluang Pengembangan Usaha Kecil", *Jurnal Tahunan CIDES*, no.1, h.157-164.
- Swasono, Sri-Edi (ed.) (1987), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.
- World Bank (1993) *The Asian Miracle: Economic Growth and Policy*, Oxford: Oxford University Press.